

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Bencana alam sulit diprediksi kapan akan terjadi, terutama gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hingga epidemi penyakit. Bencana tersebut membawa dampak kerugian baik fisik maupun non-fisik. Meskipun tidak mungkin dihindari, namun upaya yang dapat dilakukan adalah meminimalisir resiko dan dampak kerugian. Untuk mengurangi dampak kerugian, dilakukan dengan perencanaan yang mendidik dan memperingatkan penduduk yang terkena risiko, melalui penyusunan peta risiko sekaligus menciptakan masyarakat yang tangguh dan sadar akan kejadian di masa depan (Cartes, I., 2018), serta mengedepankan langkah-langkah efektif sebagai bentuk pencegahan bencana dan perspektif pencegahan bencana dan pengurangan risiko (Yu Z., Gao H, 2013).

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan perencanaan. Dalam perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah (*top-down*) dan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Mekanisme pembangunan yang bersifat *top-down* dilandasi oleh sasaran pertumbuhan yang tinggi lewat peningkatan produktivitas dan kompleksitas produksi. Sedangkan karakteristik perencanaan *botom-up* merupakan perencanaan yang bersifat populis (*people centered*), yaitu keberpihakan kepada golongan kecil dan mengakar pada masyarakat di bawah (Adisasmita, 2013).

Menurut Adisasmita (2018) konsep perencanaan yang bersifat *top-down* ini telah menimbulkan masalah dan dianggap kurang memberikan perhatian kepada masyarakat lapisan bawah. Kelemahan perencanaan *top-down* antara lain : (1) Tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, (2) Mengabaikan lingkungan sosial dan budaya dan (3) Merusak ekologi fisik (Adisasmita, 2018). Oleh karena itu sistem perencanaan tersebut kemudian digantikan dengan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*) yang aspiratif dan apresiatif dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan melibatkan mereka pada setiap proses pembangunan secara menyeluruh (Adisasmita, 2013). Bentuk perencanaan seperti ini pun digunakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan bagi wilayah/kawasan yang rawan terjadi bencana alam sebagai langkah untuk meminimalisir resiko dan dampak dimasa mendatang.

Salah satu bentuk program perencanaan *bottom-up* bagi kawasan perdesaan rawan bencana, yaitu penataan permukiman melalui CSP (*Community Settlement Plan*) atau RPP (Rencana Penataan Permukiman) yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar dan berbasiskan masyarakat serta berwawasan mitigasi bencana. Meskipun hingga saat ini, penilaian risiko bencana alam tidak memiliki prosedur dan program secara umum (Yin, Z., Yin, J., Xu, S. et al. J. Geogr. Sci, 2011) namun kegiatan yang melibatkan komunitas (masyarakat) berguna untuk mengidentifikasi risiko utama yang terkait dengan kegiatan evakuasi. Risiko yang teridentifikasi kemudian dianalisis supaya dipahami apakah risiko dapat diterima untuk membuat zona pemukiman berdasarkan lokasi dan arah rute konektif yang ditetapkan (Nasrollahi, Y. & Behnam, B, 2017). Jenis strategi mitigasi yang

dapat diadopsi, yaitu strategi mitigasi dalam skala makro untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan strategi dalam skala mikro. (Behnam, Behrouz, 2014)

Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua rencana pembangunan pada umumnya dapat dikatakan berjalan dengan baik dan dilaksanakan secara optimal. Bentuk perencanaan pembangunan saat ini masih memiliki kelemahan dan ketidak sempurnaan sistem meskipun telah dilakukan perencanaan dari bawah (Adisasmita, 2018). Ketidak sempurnaan itu disebabkan karena tidak adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun implementasi program pembangunan terutama pembangunan dalam bentuk fisik.

Hal ini terbukti dengan masih adanya beberapa usulan pembangunan infrastruktur bagi kawasan rawan bencana yang hanya dirumuskan oleh beberapa orang saja bahkan terkadang masih ditemukan usulan yang dirumuskan hanya oleh para pemangku kepentingan (pemerintah dan swasta). Contoh kasus, pembangunan sarana tempat tinggal (rumah *dome*) bagi masyarakat korban bencana alam di Dusun Ngelepen, Prambanan, DIY (gambar 1.1).

Rumah *Dome* atau yang di kenal dengan sebutan rumah *teletubis* Ngelepan merupakan bentuk bantuan kemanusiaan dari organisasi non-pemerintah asal Amerika Serikat yang yang disebut *Domes for The World* (Desiyana, 2008). Rumah *dome* di dusun Ngelepen, Prambanan, ialah rumah dengan atap berbentuk kubah dan denah berbentuk lingkaran (Saraswati, 2007).



Gambar 1.1. Rumah *Dom* Dusun Ngelepen, Prambanan, DIY  
 Sumber: [google.com](http://google.com) diakses pada 25/04/2019, pukul 16.00 WIB

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, pembangunan rumah *dome* tersebut banyak menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahannya, yaitu tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan fisik tersebut. Pasca terjadinya bencana masyarakat diberikan pilihan untuk menerima bantuan berupa nominal uang atau dapat menempati rumah yang akan disediakan oleh pemerintah melalui kerja sama dengan donatur internasional tanpa mengetahui jenis arsitektur bangunan yang akan ditempati. ([www.rappler.com](http://www.rappler.com). diakses pada 25/04/2019).

Selain itu jika ditinjau dari aspek arsitektur bangunannya, maka keberadaan rumah *dome* di Dusun Ngepelan dipandang tidak serasi dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya, semata-mata lebih menekankan pada aspek fisik dan ekonomi (Adisasmita, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program penataan permukiman pasca gempa menjadi tidak apresiatif karena disusun dengan tidak memperhatikan kebutuhan dan kehendak masyarakat lokal secara luas.

Bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 di Propinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah memberikan pelajaran berharga tentang bencana dan dampaknya, serta bagaimana cara menangani permasalahan yang sangat besar, bersifat mendadak, multi dimensional dan sangat mendesak. Penanganan tidak saja sebatas pada pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan fisik rumah, tetapi juga kebutuhan perencanaan penataan permukiman.

Desa Panjangrejo adalah salah satu desa yang terdapat pada wilayah administratif Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Desa Panjangrejo merupakan salah satu wilayah perdesaan yang menerima dampak kerugian yang cukup besar pasca gempa bumi Bantul tahun 2006. Dampak yang di rasakan tidak hanya berupa kerugian dalam bentuk fisik yang berkaitan dengan rusaknya sarana dan prasarana perdesaan tetapi juga kerugian non-fisik seperti hilangnya nyawa seseorang, terganggunya aktivitas sosial-ekonomi, memberikan dampak psikologis bagi masyarakat dan lain sebagainya. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis Desa Panjangrejo yang berbatasan langsung dengan koordinat pusat gempa, yaitu Sungai/Sesar Opak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suprpto selaku Sub. Bag. Umum Kecamatan Pundong:

“Waktu gempa dulu itu mas, hampir semua rumah-rumah disini itu *ambruk* (hancur), rusak parah mas. Termasuk Desa Panjangrejo juga, rumah-rumah disana semua rata, hancur semua mas. Ya ini juga faktor lokasi Desa Panjangrejo yang memang bersebelahan dengan sungai disana itu, sungai Opak yang merupakan sumber gempa. Tidak cuma itu, setelah gempa waktu itu semua aktivitas di kecamatan, desa-desa semuanya ikut terganggu. Terus banyak juga yang mati mas, pokoknya banyak korban jiwa akibat gempa waktu itu” (wawancara tanggal 25 April 2019).

Senada dengan pernyataan tersebut, hal ini kembali ditegaskan oleh Bapak Agus selaku Kepala Urusan Kesejahteraan, Kantor Kelurahan Desa Panjangrejo, yaitu sebagai berikut:

“Khusus Desa Panjangrejo, bisa dikatakan sebagai desa yang menerima kerugian, dampak yang besar saat terjadi gempa di tahun dua ribu enam (2006) yang lalu. Meskipun dikatakan pusat gempanya itu di Srihardono sana, tapi karena kita berbatasan langsung juga kan dengan sungai, Sesar Opak itu mas, sehingga Desa Panjangrejo juga kondisinya parah pada waktu itu. Banyak korban jiwa waktu itu. Kerusakan hampir sekitar 90% kan rata to mas. Rumah-rumah, jalan-jalan terus juga fasilitas-fasilitas di desa hancur semua, rusak parah” (wawancara tanggal 29 April 2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka sudah sepantasnya daerah atau kawasan-kawasan yang masuk dalam kategori rawan bencana harus diperhatikan dan direncanakan sedemikian rupa sebagai langkah pencegahan dan tindakan antisipasi yang berguna untuk mengurangi dampak kerugian jika sewaktu-waktu bencana gempa bumi terulang kembali. Sadar akan hal ini, pemerintah daerah (Kab. Bantul, Kec. Pundong dan Kel. Panjangrejo) mengambil tindakan dengan melakukan penyusunan Rencana Penataan Permukiman (RPP) bagi Desa Panjangrejo, sebagai salah satu pedoman pembangunan desa dalam rentang waktu 5 tahun yang dikeluarkan pada tahun 2010 (RPP Desa Panjangrejo, 2010).

RPP sebagai dokumen perencanaan umum rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman desa yang disusun secara bersama-sama oleh masyarakat desa dan difasilitasi oleh fasilitator merupakan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan peran serta masyarakat secara partisipatif dalam upaya pembangunan masyarakat desa. RPP Desa Panjangrejo menggambarkan kondisi permukiman yang ideal dimasa depan yang dicita-citakan oleh masyarakat desa sebagai hasil dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman (RPP Desa Panjangrejo, 2010).

Dalam RPP Desa Panjangrejo, komponen utama desa yang menjadi indikator pengembangan permukiman desa, antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur jalan dan pengembangan pola jalan yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk membentuk pola ruang desa.
2. Penggunaan lahan secara fungsional baik lahan budidaya dan lindung sehingga saling menunjang dan menguntungkan warga.
3. Konservasi lingkungan yang merupakan kawasan potensi bencana.
4. Fasilitas umum utama berfungsi sebagai tempat penyelamatan dari bencana (ruang mitigasi) yang perlu diperhatikan aksesibilitasnya.
5. Pemberdayaan masyarakat untuk membangun kapasitasnya menghadapi bencana dengan menggali dan mengeksplorasi kearifan lokal, yaitu pada budaya masyarakat hidup bersahabat dengan alam, konstruksi bangunan tradisional tahan gempa, penyampaian peringatan atau bahaya akan datangnya bencana dengan cara-cara tradisional.
6. Sosialisasi langkah penyadaran masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana untuk mengenal ancaman bencana dan siap menghadapinya secara lebih efisien, efektif, cepat dan hemat.

Segala aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan desa, terutama pembangunan dalam bentuk fisik termasuk penyusunan RPP Desa Panjangrejo semua di lakukan berdasarkan kebutuhan/aspirasi masyarakat, dimana masyarakat dilibatkan sejak proses identifikasi kebutuhan, penetapan skala prioritas, perencanaan dan desain, serta pelaksanaan dan proses pemeliharaan. Hal ini seperti

yang diungkapkan oleh Bapak Agus selaku Seksi Kesejahteraan, Kantor Kelurahan Desa Panjangrejo:

“Setiap kegiatan itu selalu melibatkan masyarakat supaya terjaga baik secara kualitas dan kuantitas. Khususnya untuk kegiatan-kegiatan desa, kita usahakan untuk selalu partisipasi masyarakat itu selalu ada. Baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi.” (wawancara tanggal 29 April 2019).

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana, salah satu tindakan yang perlu dilakukan terhadap wilayah yang mengalami dampak kerugian pasca terjadinya bencana, yaitu membangun kembali dengan lebih baik dari sebelum terjadinya bencana dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat melalui penataan prasarana, sarana dan sistim pelayanan masyarakat yang lebih baik dan lebih aman. Berpedoman pada kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta didukung oleh RPP yang telah dikeluarkan, maka diharapkan mampu menciptakan kondisi penataan pemukiman Desa Panjangrejo yang lebih dari sebelum dan sesudah terjadinya bencana sesuai dengan tujuan pembangunan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, pada kenyataannya perkembangan Desa Panjangrejo tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam perkembangan desa ditemukan permasalahan baru, yaitu bencana banjir disaat musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Hal ini mengakibatkan meluapnya sungai-sungai kecil yang melintasi wilayah administrasi Desa Panjangrejo (<https://panjangrejo-bantul.desa.id>. diakses pada 23/04/2019, pukul 18.20 WIB).





Gambar 1.2. Kondisi Banjir Desa Panjangrejo

Sumber: <https://panjangrejo-bantul.desa.id/assets/file/artikel>  
diakses pada 23/04/2019, pukul 18.20 WIB

Jika dilihat dari sejarah perkembangan desa, sebelum dan pasca terjadinya bencana gempa bumi bantul tahun 2006. Desa panjangrejo tidak memiliki riwayat bencana banjir. Permasalahan banjir mulai di rasakan oleh masyarakat perdesaan dalam dua tahun terakhir, tepatnya pada bulan November 2017 dan pada bulan Maret 2019 (<https://panjangrejo-bantul.desa.id>. diakses pada 23/04/2019, pukul 18.20 WIB).

Salah satu penyebab terjadinya banjir pada Desa Panjangrejo di karenakan pembangunan saluran pembuangan irigasi primer menuju sungai Opak yang dinilai terlalu kecil, sehingga sungai-sungai kecil (irigasi) yang melintasi perdesaan meluap ketika debit air meningkat, serta jika adanya penyumbatan yang terjadi pada saluran pembuangan dari sampah material yang terbawah air. Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Agus, selaku narasumber yang diwawancarai oleh peneliti:

“Khusus Panjangrejo yang disebelah barat sampai keselatan memang menjadi buangan terakhir dari sungai-sungai yang disebelah atas. Terus pembuangan yang disana yang paling ujung yang mau masuk ke sungai Opak, itu terlalu sempit mas. Sebenarnya bisa dikatakan semenjak saya masuk (2010), genangan itu ada mas, cuma yang paling besar itu, di 2017 itu badai dalia terus bulan maret kemarin itu sudah kedua kalinya cukup besar dampaknya. Tapi kalau dulu memang cuma berupa genangan-

genangan di sawah-sawah. Itu selalu tergenang tapi tidak sampai banjir, paling masuk kampung baru beberapa tahun ini” (wawancara tanggal 29 April 2019).

Hal tersebut kembali dipertegas oleh Bapak Suprpto, sebagai berikut:

“Tapi setelah gempa sudah jauhkan ada banjir. Iya ada banjir 2 kali. Itukan disini itu dapat bantuan 3 jembatan kecil yang lebarnya 1 meter, itu sempit kena banjir itu, ya terangkut banjir. Baru beberapa bulan kemarin sama 2 tahun kemarin” (wawancara tanggal 25 April 2019).

Permasalahan banjir di Desa Panjangrejo belum membawa dampak yang cukup serius bagi kelangsungan hidup masyarakat maupun lingkungan alami desa. Namun jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka di khawatirkan akan membawah dampak yang lebih serius dikemudian hari.



Gambar 1.3. Kondisi Eksisting Pembuangan Akhir Saluran Irigasi Primer Desa Panjangrejo  
*Sumber: Survey Lapangan, 2019*

Selain itu, ada pun permasalahan lainnya yang pernah terjadi di Desa Panjangrejo menyangkut pembangunan infrastruktur perdesaan, yaitu pada pembangunan jaringan air bersih perpipaan (PDAM). Permasalahan tersebut ditinjau dari aspek kemanfaatan infrastruktur yang tidak berdaya guna secara efektif bagi masyarakat (pengguna). Masyarakat lebih mempertahankan kebiasaan lama dengan tetap menggunakan sumur galian untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, bahkan saat musim kemarau panjang sekalipun.

Dengan berbagai alasan masyarakat lebih memilih menggunakan sumur galian dari pada harus memanfaatkan jaringan PDAM yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut berakibat pada terbengkalainya infrastruktur, sehingga dilakukannya tindakan penutupan atau pencabutan jaringan PDAM tersebut. Permasalahan tersebut seperti hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Suprpto, sebagai berikut:

“Kalau air bersih itu sudah terpenuhi mas, cuma kalau disini itu pakai sumur gali. Dulu ada PDAM tapi orang *gak* pakai dulu. *Nah* karena *gak* pakai kan dicabut” (wawancara tanggal 25 April 2019)..

Implementasi program pembangunan infrastruktur yang pernah dilakukan di Desa Panjangrejo secara tidak langsung dapat disimpulkan mengalami kegagalan dan tidak tepat sasaran dalam melayani kebutuhan hidup masyarakat desa. Keadaan tersebut juga bertentangan dengan prinsip pembangunan partisipatif karena disusun dengan tidak memperhatikan kebutuhan dan kehendak masyarakat setempat secara luas (Adisasmita, 2013).

Terlepas dari pada itu, langkah yang dapat diambil sebagai bentuk pengendalian, pengelolaan, perencanaan pembangunan untuk mengurangi tingkat kegagalan dari program pembangunan pasca bencana di Desa Panjangrejo, yaitu dapat dilakukan melalui tindakan evaluasi ketercapaian program dari RPP yang dijadikan sebagai pedoman pembangunan desa. Alasan dilakukan tindakan evaluasi untuk melihat bagaimana bentuk produk penataan Desa Panjangrejo sebagai hasil dari sebuah perencanaan yang partisipatif. Namun, kurang lebih 10 tahun sudah berlalu setelah dikeluarkan dokumen RPP Desa Panjangrejo, saat ini belum ada tindakan evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat ketercapaian

dari RPP dan tindakan apa yang akan diambil selanjutnya terkait pembangunan infrastruktur desa yang berbasis mitigasi bencana.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka, peneliti menganggap penting melakukan penelitian dengan topik Evaluasi Penataan Permukiman Pasca Bencana Di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, dengan berpedoman pada RPP Desa Panjangrejo tahun 2010. Sehingga dalam perkembangannya, diharapkan Desa Panjangrejo dapat tumbuh dan berkembang menjadi sebuah desa mandiri yang tanggap terhadap bencana, serta dapat mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perdesaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketercapaian dari program pembangunan infrastruktur permukiman pasca bencana di Desa Panjangrejo?
2. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat pada setiap tahapan dalam proses pembangunan infrastruktur permukiman pasca bencana di Desa Panjangrejo?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan dalam proses pembangunan infrastruktur permukiman pasca bencana Desa Panjangrejo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat (mengukur) bagaimana ketercapaian produk penataan permukiman sebagai hasil dari sebuah perencanaan yang partisipatif melalui studi Evaluasi Penataan Permukiman Pasca Bencana Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Evaluasi yang dilakukan terfokus pada dua aspek, yaitu bentuk ketercapaian program, khususnya program pembangunan infrastruktur fisik perdesaan dan aspek pendekatan partisipasi yang dipergunakan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, seperti manfaat bagi kalangan pemerintah dan masyarakat, manfaat bagi ilmu pengetahuan, dan manfaat bagi peneliti. Berikut merupakan beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian.

1. Manfaat penelitian untuk pemerintah dan masyarakat, yaitu dapat dijadikan sebagai informasi balik dalam mengkaji program-program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan mengutamakan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat.
2. Manfaat penelitian untuk ilmu pengetahuan, yaitu secara akademis, diharapkan menjadi bahan referensi dan informasi bagi mereka yang ingin mendalami dan meneliti lebih lanjut tentang penerapan pendekatan partisipatif dalam pembangunan infrastruktur perdesaan yang rawan bencana.

3. Manfaat penelitian untuk penulis, yaitu memperkaya wawasan yang berkaitan dengan proses penataan infrastruktur permukiman desa pasca bencana mulai dari tahap penyusunan rencana, tahap implementasi program, hingga tahap evaluasi dengan menggunakan pendekatan partisipatif masyarakat. Sehingga dapat memberikan saran berupa rekomendasi kepada para *stakeholder* (pemerintah, masyarakat, swasta) yang bersangkutan agar dikemudian hari dapat melakukan rencana penataan permukiman desa yang lebih baik, lebih efisien dan efektif, serta berdaya guna secara optimal dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.5.1 Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah studi dalam penelitian ini adalah Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul. Luas wilayah administrasi Desa Panjangrejo 571 ha yang terbagi dalam 16 (enam belas) Dusun dan 75 Rukun Tetangga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.4. Peta Lokasi Penelitian.

### **1.5.2 Lingkup Materi**

Lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait Evaluasi Penataan Permukiman Pasca Bencana Desa Panjangrejo, dirinci sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis tentang bentuk ketercapaian RPP. Dalam hal ini, kajian difokuskan pada ketercapaian program pembangunan infrastruktur pasca bencana di Desa Panjangrejo.
2. Mengidentifikasi dan memaparkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari masing-masing tahapan dalam proses pembangunan infrastruktur pasca bencana di Desa Panjangrejo.
3. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi program pembangunan infrastruktur pasca bencana di Desa Panjangrejo.

### **1.5.3 Lingkup Waktu**

Ruang lingkup waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini, yaitu dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yang terhitung mulai dari bulan Maret sampai pada bulan Agustus 2019.



Gambar 1.4. Peta Lokasi Penelitian

Sumber: <https://desapanjangrejo.wordpress.com/peta/>.

Diakses pada 01/03/2019 pukul 13.00 WIB

## 1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dari peneliti, terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait evaluasi dokumen perencanaan pembangunan perdesaan maupun evaluasi pendekatan partisipatif dalam pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, baik itu dari lokus wilayah penelitian maupun fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya terkait dengan penelitian dan keaslian penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.



Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

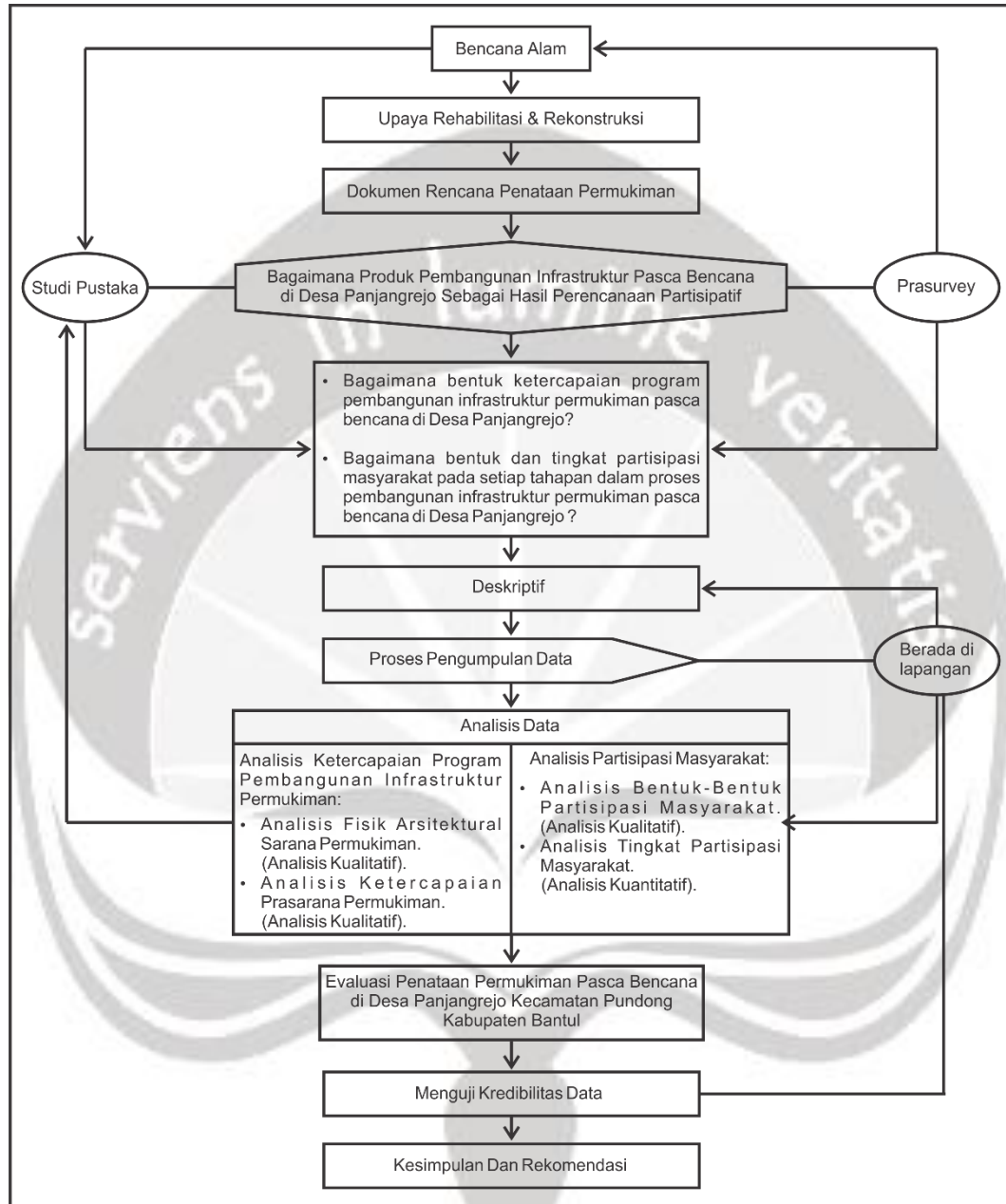
NO	PENELITI	JUDUL	FOKUS PERMASALAHAN	HASIL	KETERANGAN
1.	Cakrawijaya, Riyanto & Nuroji, 2014	Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kec. Turi, Kab. Sleman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana hubungan antara program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan neraca ekonomi sumberdaya lahan di Desa Wonokerto,</li> <li>• Bagaimana hubungan antara program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan peningkatan pendapatan masyarakat Di Desa Wonokerto, serta</li> <li>• Bagaimana hubungan antara program pembangunan infrastruktur perdesaan dengan diversifikasi ekonomi di Desa Wonokerto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertama, korelasi pembangunan infrastruktur PPIP terhadap pertumbuhan ekonomi perdesaan di Desa Wonokerto terlihat secara parsial, yaitu pembangunan talud irigasi terhadap perkebunan, dan talud jalan dan peningkatan jalan terhadap pemukiman.</li> <li>• Kedua meskipun pembangunan infrastruktur oleh PPIP berkontribusi secara positif, namun hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, serta bersifat sementara (tambahan pendapatan dari keterlibatan proses pelaksanaan infrastruktur).</li> <li>• Terdapat pendekatan-pendekatan yang mungkin tidak ditemui pada kasus lain sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir. Kondisi tersebut terkait dengan tipologi kawasan desa yang merupakan kawasan perkebunan salak, serta memiliki topografi yang berbukit. Sehingga beberapa jenis infrastruktur memiliki nilai manfaat yang berbeda dengan daerah lain.</li> </ul>	Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 25, No. 2, pp 137-156.

2.	Hakim, 2017	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi pembangunan Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat merasa puas dan menaruh kepercayaan terhadap pemerintah desa.</li> </ul>	Jurnal Politikom Indonesia. Vol. 2, No. 2, pp 43 – 53.
3.	Sudarmono, 2007	Implementasi Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Samaulue Kabupaten Pinrang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana implementasi pendekatan partisipatif dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Samaulue Kecamatan Lanrisang?</li> <li>• Faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat Desa Samaulue Kecamatan Lanrisang dalam pembangunan infrastruktur pedesaan?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi pendekatan partisipatif dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Samaulue Kecamatan Lanrisang secara umum belum terlaksana dengan baik.</li> <li>• Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan adalah (a) Penerapan Kebijakan yang tidak fleksibel terhadap kondisi masyarakat Desa Samaulue; (b) Perbedaan persepsi terhadap tujuan pembangunan Desa samaulue di dalam masyarakat Desa Samaulue; serta (c) Lemahnya koordinasi internal antara Kepala Desa Samaulue dengan Perangkat desa yang lain.</li> </ul>	Tesis. Program Studi Administrasi Pembangunan: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar.

4.	Widodo, 2018	Evaluasi Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BKM Pangudi Mulya.</li> <li>• Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat pada tahap implementasi program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan oleh BKM Pangudi Mulya.</li> <li>• Bagaimana hasil dari program pembangunan infra-struktur yang dilakukan oleh BKM Pangudi Mulya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahap perencanaan warga masyarakat non-anggota ikut berpartisipasi menyuarakan pendapatnya dan ikut serta dalam menyusun rencana program.</li> <li>• Pada tahap implementasi, warga non-anggota ikut berpartisipasi dapat dalam bentuk tenaga, materi, donasi maupun logistik. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara sukarela tanpa adanya paksaan dari anggota BKM.</li> <li>• Program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat selesai tepat waktu. Hal ini dikarenakan realisasi program dibantu oleh partisipasi masyarakat. Selain itu hasil program dapat merubah keadaan masyarakat, terutama pada sektor kesehatan.</li> </ul>	Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat. Vol. 5, No. 2, pp 108-121.
----	-----------------	---	--	--	---

*Sumber: Peneliti, 2019*

## 1.7 Kerangka Pikir Studi



Gambar. 1.5. Kerangka Pikir Studi  
Sumber: Peneliti, 2019

## 1.8 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

NO.	KEGIATAN	RENCANA WAKTU PENELITIAN (2019)																							
		MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan studi obyek melalui dokumen perencanaan, jurnal, penelitian terdahulu, internet	■	■																						
2	Penyusunan naska proposal tesis			■	■	■																			
3	Sidang proposal tesis					■																			
4	Studi literatur						■	■	■	■	■	■	■												
5	Pengolahan dan analisis data penelitian						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
6	Penyusunan naskah akhir tesis													■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Sidang akhir tesis																					■			
8	Penyempurnaan naskah akhir tesis																					■	■		
9	Pembuatan paper ringkasan tesis																							■	■

Sumber: Peneliti, 2019

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka pikir studi, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang tinjauan pustaka, tentang cara penulis dalam menjawab permasalahan berdasarkan studi literatur-literatur yang ada sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang metodologi penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk menjawab fokus permasalahan yang telah ditetapkan.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH**

Berisi tentang gambaran umum Kecamatan Pundong dan Desa Panjangrejo, kondisi eksisting desa, serta karakteristik Desa Panjangrejo.

## **BAB V PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan dari hasil penelitian evaluasi penataan permukiman pascabencana Desa Panjangrejo.

## **BAB VI KESIMPULAN**

Pada Bab ini merupakan memaparkan tentang kesimpulan dari hasil akhir penelitian dan saran bagi pemerintah maupun masyarakat setempat.

